

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan diluar dunia perbankan, seperti sektor rill dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial. Perkembangan faktor-faktor internal dan eksternal perbankan tersebut menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 periode. Ketiga periode tersebut yaitu: pertama, kondisi perbankan di Indonesia sebelum rangkaian paket-paket deregulasi di sektor rill dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an; kedua, kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an; ketiga, kondisi perbankan di Indonesia pada masa krisis sejak akhir tahun 1990-an (Susilo, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, 2000: 39)

Kondisi perbankan di Indonesia, erat terkait dan tidak dapat ditinjau secara terpisah dari kondisi makro ekonomi. Dukungan sistem keuangan terhadap kondisi ekonomi Indonesia selalu diperankan oleh sistem perbankan tersebut. Sebelum krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, kondisi ekonomi Indonesia dinilai oleh banyak pihak telah mencapai kemajuan yang pesat sebagai hasil dari

Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I) periode 1969-1994, dengan berbagai prestasi ekonomi yang banyak dicapai. Akan tetapi setelah krisis ekonomi pada tahun 1997 melanda Indonesia yang ditandai dengan banyaknya perusahaan yang bangkrut, buruknya kinerja perbankan nasional, persoalan kredit macet, rendahnya daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri sampai adanya ketakutan pemilik dan manajemen perusahaan maupun pemerintah terhadap berbagai konsekuensi yang akan timbul dari adanya perdagangan bebas.

Kondisi perekonomian secara makro dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investor dalam penempatan dananya pada suatu jenis investasi. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan kinerja perbankan menurun tajam, bahkan diantaranya menderita kerugian. Pada saat itu variabel ekonomi makro seperti tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah, dan inflasi mengalami perubahan yang cukup tajam.

Suku bunga adalah harga yang harus dibayar atas modal pinjaman, dan dividen serta keuntungan modal yang merupakan hasil dari modal ekuitas. Tingkat suku bunga yang meningkat menyebabkan investor menarik investasinya pada saham dan memindahkan pada investasi berupa tabungan dan deposito sehingga akan mempengaruhi harga saham dan return yang diisyaratkan oleh investor.

Nilai tukar merupakan harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lainnya. Melemahnya kurs nilai tukar rupiah akan menyebabkan meningkatnya harga barang impor diikuti oleh harga produk dalam negeri sehingga mengakibatkan inflasi, yaitu kecenderungan terjadinya

peningkatan harga-harga produk secara keseluruhan. Terjadinya inflasi berpengaruh terhadap investasi di pasar barang, hal ini disebabkan karena masyarakat meningkatkan permintaannya terhadap barang dan jasa akan terus meningkat di masa mendatang. Terdepresiasinya kurs mata uang domestik mengindikasikan bahwa masyarakat lebih cenderung melakukan aksi beli dollar sehingga variabel kurs berpengaruh terhadap pasar valuta asing, sedangkan suku bunga SBI berpengaruh terhadap pasar uang, dalam hal ini sektor perbankan (Batiz, *International Finance and Open Economy, Macroeconomis*.1994).

Pasar modal adalah salah satu dari sekian banyak alternatif sumber investasi. Pasar modal berfungsi memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk memperoleh sumber pembiayaan jangka panjang yang relatif murah, baik untuk perluasan usaha, restrukturisasi atau memobilisasi dana dari masyarakat. Untuk mewujudkan terciptanya kredibilitaas pasar modal, perlu diperhitungkan faktor-faktor penting yang menentukan efisiensi dan kredibilitas pasar modal. Salah satunya adalah dari sisi kebijakan pemerintah dalam mengelola ekonomi makro (Kompas,2005). Variabel ekonomi makro yang mencerminkan alokasi pilihan investasi yaitu inflasi, kurs, suku bunga, dan jumlah uang yang beredar.

Seperti halnya pasar modal, industri perbankan sebagai salah satu lembaga pembiayaan, juga mempunyai peranan penting dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu diperlukan sistem perbankan yang sehat dan tidak bermasalah sebagai prasyarat terciptanya pearekonomian yang baik. Namun terlepas dari hal tersebut, perlu disadari bahwa perbankan nasional

merupakan salah satu sektor ekonomi di Indonesia yang rentan terhadap gejolak dan perubahan siklus ekonomi (Goldstein, *The Asian Financial Crisis : Causes, Cures and Systematic Implication*. 1998 dan Nograho, *Industri Perbankan dan Keuangan Nasional*.2000).

Perbankan yang baik mampu menjalankan tugasnya secara profesional, yaitu sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan dengan tujuan untuk mengatasi terjadinya kelesuan ekonomi. Pengalokasian dana dari perbankan dapat berupa pemberian kredit modal usaha dan kredit investasi, pada umumnya pemberian kredit modal usaha lebih besar dibandingkan kredit investasi. Hal ini disebabkan karena dana perbankan sebagian besar berasal dari dana jangka pendek yaitu tabungan dan deposito. Untuk mengurangi resiko terjadinya kepailitan, sebagian besar industri perbankan mencari sumber pembiayaan jangka panjang yaitu dengan cara menerbitkan surat berharga berupa saham dan obligasi. Beranjak dari kejadian ini pemerintah merasa perlu untuk segera melakukan restrukturisasi perbankan melalui upaya-upaya penyehatan dan pemberdayaan perbankan nasional. Dengan menyadari bahwa perekonomian tidak akan berjalan dan berfungsi dengan baik tanpa suatu sistem perbankan yang baik, pemerintah mengeluarkan kewajiban penjamin kewajiban bank umum untuk tujuan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap bank, menstabilkan sektor perbankan dan mengembalikan fungsi perbankan sebagai jantung dan roda perekonomian nasional dengan memperhatikan dampak program tersebut terhadap anggaran pemerintah dan neraca pembayaran. Kemudian pemerintah

juga mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas untuk menjalankan program penjamin pemerintah dan penyehatan sektor perbankan termasuk restrukturisasi utang perbankan (Pandia, dkk., *Lembaga Keuangan*. 2005: 218-219)

Tujuan dari program penyehatan perbankan yang dicanangkan oleh pemerintah adalah terbentuknya sektor perbankan yang sehat, dimana bank yang beroperasi memiliki manajemen pengelolaan termasuk riskmanagement yang baik dengan standard internasional dan memiliki daya saing di pasar global (Pandia, dkk., 2005: 222). Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, masyarakat pengguna jasa maupun Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank. Kondisi bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen resiko. Bank Indonesia telah menetapkan standar-standar pengukuran kinerja atau tingkat kesehatan bank yang meliputi unsur *capital adequacy, asset quality, management, earning and liquidity (CAMEL)* sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilai tingkat kesehatan bank umum.

Kelima aspek tersebut dinilai dengan menggunakan rasio keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kesehatan perbankan, memprediksi kelangsungan usaha baik yang sehat maupun yang tidak sehat (Chen, 1981 sebagaimana dikutip oleh Wilopo, 2001). CAMEL tidak sekedar mengukur tingkat kesehatan bank, tetapi juga digunakan sebagai indikator dalam

menyusun peringkat dan memprediksi kebangkrutan bank (Payamata dan Machfoedz, *Evaluasi Kinerja Perusahaan Perbankan Sebelum dan Sesudah menja di Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ)*.1999:56). Indikator-indikator rasio CAMEL yang digunakan dalam mengukur tingkat kesehatan bank adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Loan (NPL)*, Pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Pemenuhan PPAP), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Net Interest Margin (NIM)*, *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Loan to Deposito Rasio (LDR)*.

Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kuantitatif atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, seperti tercantum dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia No.26/23/KEP/DER tanggal 29 mei 1993 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank (BI,1993). Di Indonesia, penetapan CAMEL sebagai indikator penilaian kesehatan bank tertuang dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/23/KEP/DIR tanggal 29 mei 1993 tentang tata cara penilaian kesehatan bank. Peneetapan tersebut kembali dikukuhkan dengan dikeluarkan peraturan baru yaitu surat keputusan direksi Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 april 1997 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum, yang kemudian dirubah dengan SK DIR BI No.30/277/KEP/DIR tanggal 19 maret 1998 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum, dan dirubah lagi dengan peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum yang menyebutkan bahwa kesehatan dari sebuah bank dapat dinilai dengan metode CAMEL.

Hasil penelitian kesehatan terhadap suatu bank yang menggunakan alat analisis CAMEL yang didasarkan pada peraturan Bank Indonesia dapat dimanfaatkan secara langsung oleh bank itu sendiri, pemilik modal, pengelolaan ataupun masyarakat, serta dapat digunakan untuk menentukan menentukan predikat tingkat kesehatan bank, yang dikategorikan sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Namun demikian, laporan hasil perhitungan kesehatan bank versi peraturan Bank Indonesia itu sendiri. Terlebih lagi terkait dengan pengukuran aspek manajemen umum dan manajemen resiko yang pengukurannya sangat kualitatif yaitu terkait 250 pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak manajemen bank (Dendawijaya,*Manajemen Perbankan*.2001). Keadaan tersebut menjadikan beberapa penelitian menggunakan pengukuran rasio-rasio keuangan didasarkan pada formula yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai pengganti pengukuran aspek manajemen yang diukur dengan BOPO dan NIM.

Dengan demikian diharapkan diperoleh suatu hasil yang nyata terhadap tingkat kesehatan dari bank-bank yang bersangkutan sehingga masyarakat dan calon-calon nasabah tidak salah dalam menentukan bank-bank yang dipilihnya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“ANALISA RASIO CAMEL DAN VARIABEL MAKRO EKONOMI DALAM MENILAI KESEHATAN PERBANKAN GO PUBLIC DI INDONESIA”**

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah. Apakah analisis rasio CAMEL dan variabel makro ekonomi dapat memprediksi kesehatan perbankan go public di Indonesia ?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah. Untuk mengetahui rasio CAMEL dan variabel makro ekonomidapat memprediksi kesehatan perbankan yang telah go public di Indonesia.

## **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

### 1. Perbankan :

Dapat digunakan sebagai wacana bagi manajemen untuk menentukan strategi perusahaan, dimana kinerja keuangan tidak hanya dapat diukur dengan rasio CAMEL saja, akan tetapi dapat pula digunakan variabel makro ekonomi, yang perlu untuk dipertimbangkan karena menyediakan insentif yang tinggi bagi manajer untuk mencari dan mengimplementasikan investasi yang menciptakan nilai.

### 2. Mahasiswa :

Dapat memberikan wacana baru tentang analisa kesehatan perbankan dan memberikan alternatif lain dalam menganalisis kesehatan perbankan.

3. Peneliti selanjutnya :

Dapat memberikan masukan, khususnya yang berkaitan dengan perbankan.

#### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Penulisan ini dilakukan secara sistematika yang bertujuan agar dalam pemahaman dan pembahasannya ada kemudahn penyusunan sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJUAN PUSTAKA**

Berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang menjadi acuan dalam penelitian untuk mendukung jalannya proses penyelesaian masalah.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisikan tentang pendekatan penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian, data dan pengumpulan data yang akan diteliti dan diolah lebih lanjut, teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang diskriptif obyek penelitian analisis data dan pembahasannya

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang simpulan atas hasil pembahasan analisis data penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.